

EMPOWERMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AS AN EFFORT TO EXPAND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

Selamat Riadi¹, Titin Windiasari², Ahmad Ridho Hidayat³.

^{1,2,3} Universitas Islam Al-Azhar

Email: riadiselamat123@unizar.ac.id¹, windiasari@unizar.ac.id²,
ahmadridho@unizar.ac.id³

ABSTRACT

This research is entitled "Empowerment of Small and Medium Enterprises as an Effort to Expand Employment Opportunities (Study of the Central Lombok Regency Government)" The aim of this research is to describe and analyze employment conditions and the development of Small and Medium Enterprises in Central Lombok Regency as well as describe and analyze efforts to empower Small and Medium Enterprises as an effort to expand employment opportunities. carried out by the Central Lombok Regency Government. The type of research is descriptive with a qualitative approach. The role of empowerment in opening up employment opportunities, while the observation unit is Small and Medium Enterprises in Central Lombok Regency. Research results The role of empowerment in increasing the capacity of Small and Medium Enterprises in the reform era has quite a strategic position. Apart from being the sector that is most resistant to crises, it is also able to provide employment opportunities and reduce the significant problem of unemployment outside the formal sector. The existence of this sector which is not tied to a complicated bureaucratic system makes it possible for anyone to try in this sector. Moreover, if it is supported by various special skills and expertise, sophisticated facilities and infrastructure, the Small and Medium Enterprises sector will promise huge profits. The community as Small and Medium Enterprises actors should open their minds not to be pragmatic in accepting the empowerment provided by the government. Training and counseling should be used as an opportunity to gain knowledge and knowledge related to developing more innovative and competitive business products. Apart from that, it can increase the capacity of the community so that they are able to compete in the world of work.

Keywords: *Empowerment, Small and Medium Enterprises, Job opportunities*

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH SEBAGAI UPAYA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Sebagai Upaya Perluasan Kesempatan Kerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah)" Tujuan

penelitian ini untuk Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi ketenagakerjaan dan perkembangan UKM di Kabupaten Lombok Tengah serta Mendeskripsikan dan menganalisis upaya pemberdayaan UKM sebagai upaya perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. peran pemberdayaan dalam membuka kesempatan kerja, sedangkan unit observasinya adalah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah. Analisis dan Penafsiran data dengan cara reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian Peran pemberdayaan dalam meningkatkan kapasitas UKM di era reformasi cukup mempunyai posisi yang strategis. Selain sebagai sektor yang paling tahan dilanda krisis juga mampu menyediakan kesempatan kerja dan mengurangi masalah pengangguran yang cukup besar diluar sektor formal. Keberadaan sektor ini yang tidak terikat pada rumitnya sistem birokrasi memungkinkan bagi siapa saja untuk berusaha disektor ini. Terlebih bila ditunjang dengan berbagai keahlian dan ketrampilan khusus, sarana dan prasarana yang canggih maka sektor UKM akan sangat menjajikan keuntungan yang besar. Bagi masyarakat sebagai pelaku UMKM seharusnya membuka pemikiran untuk tidak bersikap pragmatis dalam menerima pemberdayaan yang diberikan pemerintah. Dengan adanya pelatihan maupun penyuluhan sebaiknya digunakan sebagai kesempatan dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan terkait pengembangan produk usaha yang lebih inovatif dan berdaya saing. Selain itu dapat meningkatkan kapasitas dari masyarakat sehingga mampu berdaya saing dalam dunia kerja.

Kata kunci: Pemberdayaan, UKM, Kesempatan kerja

PENDAHULUAN

Studi yang dilakukan oleh Todaro (2000), dikatakan bahwa sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik seperti sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya), dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. Para pekerja yang menciptakan sendiri lapangan kerjanya di sektor UMKM biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Pada umumnya mereka tidak mempunyai ketrampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja. Oleh sebab itu, produktivitasnya dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah daripada kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Selain itu, mereka yang berada di sektor tersebut juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan seperti yang dinikmati rekan-rekan mereka di sektor lain.

UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil, UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus

berubah(Siradjuddin, 2023). Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. UMKM justru mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, misalnya untuk melakukan produksi yang bersifat substitusi impor dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Karena itu, pengembangan UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Suhendar (2010), mengatakan bahwa kemampuan UMKM untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan internal UMKM yang kondusif, mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat kewirausahaan (*entrepreneurship*). Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif, yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global. Selain kedua kondisi tersebut, strategi pemberdayaan UMKM untuk dapat memasuki pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup UMKM. Namun dalam perkembangannya, UMKM memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, diantaranya keterbatasan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis (John Friadi, 2022). Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan akses UMKM pada informasi pasar, lokasi usaha dan jejaring usaha agar produktivitas dan daya saingnya meningkat.

Namun dalam perkembangannya, UMKM memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, diantaranya keterbatasan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan akses UMKM pada informasi pasar, lokasi usaha dan jejaring usaha agar produktivitas dan daya saingnya meningkat. Sehingga dituntut adanya peran dan partisipasi berbagai pihak terutama pemerintah daerah dan kalangan perguruan tinggi untuk membantu dan memfasilitasi akses.

Sesuai dengan hasil pemetaan usaha mikro, kecil dan menengah kerjasama Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dengan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB tahun 2005 bahwa jumlah UMKM sebanyak 392.162 unit (tidak termasuk sektor pertanian) dengan

penyerapan tenaga kerja sebanyak 508.636 unit, sedangkan data tahun 2006 menurut NTB dalam angka (BPS) jumlah UMKM sebanyak 544.607 unit, pada tahun 2015 bertambah sebanyak 1.080 unit, yang berasal dari Wira Usaha Baru sehingga jumlah UMKM per Desember 2015 menjadi 645.788 unit, dan sampai dengan Tahun 2016 bertambah sebanyak 1.200 unit yang berasal dari Wirausaha Baru sehingga jumlah UMKM sampai dengan tahun 2016 berjumlah 646.988 unit, tahun 2017 sebanyak 648.827 dan tahun 2018 sebanyak 648.987.

Pembinaan pengusaha kecil dan menengah merupakan langkah yang sangat strategis untuk dikembangkan demi memperkuat struktur perekonomian nasional dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberhasilan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah sangat ditentukan oleh pendayagunaan secara optimal sumber daya yang tersedia seperti pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola UMKM, pembinaan secara terpadu dari pemerintah serta dukungan masyarakat.

Berdasarkan data diatas jumlah UMKM yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan Kabupaten Lombok Timur memiliki UMKM terbanyak dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya yaitu sebanyak 161.261 dan disusul oleh kabupaten Lombok Tengah sebanyak 129,430.

Sedangkan perbandingan jumlah Jumlah Angkatan Kerja NTB pada Agustus 2017 sebanyak 2.396.169 orang, turun 124.505 orang dibanding Februari 2017 (semester lalu) dan turun 68.162 orang dibanding Agustus 2016 (setahun yang lalu). Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 sebanyak 2.316.720 orang, turun 106.720 orang dibanding keadaan semester sebelumnya dan berkurang 50.590 orang dibanding keadaan setahun yang sebelumnya. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 79.449 orang, mengalami penurunan sekitar 17.775 orang dibanding semester lalu dan berkurang sebanyak 17.572 orang dibanding setahun yang lalu. Sejalan dengan turunnya jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan. TPAK pada Agustus 2017 tercatat sebesar 68,49 persen, turun 4,13 persen poin dibanding semester lalu dan turun sebesar 3,07 persen poin dibanding setahun yang lalu. Penurunan TPAK disebabkan musim panen bergeser ke bulan September sehingga pekerja masih belum terserap dan tergolong sebagai bukan angkatan kerja.

Gambar. 1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

Status Keadaan Ketenagakerjaan (1)	1 Tahun Lalu Agustus 2016 (2)	Semester Lalu Februari 2017 (3)	Saat Ini Agustus 2017 (4)	Perubahan 1 Tahunan (Agt 2016–Agt 2017)		Perubahan 1 Semester (Feb 2017–Agt 2017)	
	Ribu Orang			Ribu Orang	Persen	Ribu Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	3.443,45	3.470,95	3.498,40	54,95	1,60	27,45	0,79
Angkatan Kerja	2.464,33	2.520,67	2.396,17	-68,16	-2,77	-124,50	-4,94
Bekerja	2.367,31	2.423,45	2.316,72	-50,59	-2,14	-106,73	-4,40
Pengangguran	97,02	97,22	79,45	-17,57	-18,11	-17,77	-18,28
Bukan Angkatan Kerja	979,12	950,27	1.102,23	123,11	12,57	151,96	15,99
Sekolah	306,81	258,22	273,34	-33,47	-10,91	15,12	5,86
Mengurus Rumah Tangga	546,73	569,55	695,31	148,58	27,18	125,76	22,08
Lainnya	125,58	122,50	133,58	8,00	6,37	11,08	9,04
				Persen		Persen Poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,94	3,86	3,32		-0,62		-0,54
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,57	72,62	68,49		-3,07		-4,13

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2017, TPAK laki-laki sebesar 82,11 persen sementara TPAK perempuan hanya 56,18 persen. Namun demikian, dibanding kondisi setahun yang lalu TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 5,80 persen poin sementara TPAK laki-laki juga mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin (Gambar 1).

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih dalam kategori yang cukup memprihatinkan. Pengangguran dapat diatasi dengan menempatkan tenaga penganggur pada lapangan pekerjaan. Untuk mempekerjakan para tenaga penganggur tersebut harus diciptakan lapangan kerja baru. Namun semakin hari jumlah pengangguran terus meningkat lebih cepat dari pada peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Walaupun demikian kita masih harus tetap optimis masalah angkatan kerja yang tinggi dapat dicarikan solusinya. Salah satu hal yang mungkin bisa dijadikan solusi dari pengurangan angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja adalah dengan mengembangkan sektor UKM (Novitasari, 2022).

Disisi lain diketahui selama ini Kabupaten Lombok Tengah adalah merupakan penyumbang terbesar tenaga kerja ke luar negeri tapi disayangkan tenaga kerja di Propinsi NTB menjadi pekerja kasar dan diharapkan kedepannya warga masyarakat diharapkan mereka bisa mandiri dan berani membuka lapangan kerja sendiri dengan skill yang sudah memadai dan tergantung potensi di wilayah Kabupaten itu sendiri. Saat ini Lombok tengah sedang giat giatnya melaksanakan pembangunan disektor Pariwisata, terutama untuk kawasan ekonomi kreatif atau KEK di Kuta Mandalika kemudian akan dibangun juga

Sirkuit Moto GP yang tentunya akan menyerap ribuan tenaga kerja dan peluang kerja terutama disektor akomodasi, pariwisata seperti layanan transportasi, penginapan, hotel, restaurant dan sebagainya, itu sangat menjanjikan karena jika tidak disikapi dengan baik peluang ataupun potensi tersebut maka dikhawatirkan mereka akan tersingkir dengan sendirinya. Hal ini juga merupakan peluang tersendiri untuk UMKM untuk mengembangkan dirinya dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya Kabupaten Lombok Tengah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini berupaya menggambarkan upaya pemberdayaan UKM sebagai upaya perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: Ucapan, atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan latar dan individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan; subjek penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variable yang terpisah atau menjadi hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Sedangkan maksud dari jenis penelitian deskriptif menurut Hadari Nawawi dan Hadari Martini (2005) Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemilihan yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan apa yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode penelitian deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact Finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya). Lokasi penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan situs penelitian adalah tempat atau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data atau informasi yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan Wawancara Mendalam (indepth Interview), Observasi (pengamatan), Dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan Transferabilitas, Kredibilitas, Dependabilitas, Konfirmabilitas. Analisis data menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pusat pemerintahannya berada di Kota Praya. Secara geografis Kabupaten Lombok Tengah terletak pada $116^{\circ}05'$ – $116^{\circ}24'$ bujur timur dan $8^{\circ}24'$ – $8^{\circ}57'$ lintang selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 56 a. Sebelah Utara: Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten dan Kabupaten Lombok Timur, b. Sebelah selatan: Samudera Indonesia, c. Sebelah barat : Kabupaten Lombok Barat, d. Sebelah Timur: Kabupaten Lombok Timur Adapun kondisi geografis Kabupaten Lombok Tengah cukup bervariasi yang terdiri atas perbukitan yang daerahnya termasuk dalam kawasan Gunung Rinjani yang terletak di tengah-tengah Pulau Lombok. Kemudian daratan rendah yang merupakan pusat kegiatan pertanian yang terhampar di bagian tengah, membujur mulai dari utara ke selatan. Sedangkan garis pantai membentang mulai dari pantai Torok AiQ Beleq Kecamatan Praya Barat Daya, pantai Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, sampai dengan Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur. Adapun luas wilayah Lombok Tengah secara keseluruhan adalah 1.208,39 Km² (Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2013 dan Perda No. 7 tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2031). Berikut ini akan diulas mengenai gambaran subjek penelitian yaitu terkait dengan UMKM seperti sentra kerajinan anyaman, kerajinan tenun, yang merupakan komoditas Ekspor andalan Kabupaten Lombok Tengah.



Gambar Hasil Inovasi Kerajinan Anyaman

Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah merupakan desa sentra industri yang tertua dan terbesar di Pulau Lombok. Kerajinan yang dihasilkan oleh desa ini adalah

pernak-pernik anyaman. Hampir semua penduduknya bermata-pencaharian sebagai pengerajin anyaman. Tak hanya hasil kerajinan mereka sendiri yang dikerjakan, namun penduduk setempat juga membantu menyelesaikan hasil kerajinan (setengah jadi) dari desa lain. Misalnya Desa Penunjak yang terkenal dengan kerajinan tembikarnya. Hasil anyaman Desa Beleka dipasarkan dari wilayah lokal menjalar sampai ke internasional. Hasil kerajinan anyaman yang dibuat di Desa Beleka Lombok ini juga bermacam-macam. Seperti pelaratan rumah tangga, hiasan dinding, pernak-pernik dekorasi, dan lain sebagainya yang sebagian besar berbahan dasar *Ketaq* dan Rotan. Harga yang ditawarkan juga bervariasi dan relatif murah, tergantung dari ukuran dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Misalnya, Anda bisa membawa pulang sebuah vas bunga atau piring buah dengan harga Rp. 15.000 hingga Rp. 30.000 per buah.

Kerajinan selanjutnya adalah tenun gedogan yang awalnya muncul sebagai akibat refleksi budaya dan tradisi masyarakat di pulau Lombok yang dipergunakan sebagai pakaian pada upacara-upacara. Umumnya motif serta desain yang dihasilkan merupakan cermin dari khasanah budaya yang berkembang di daerah, dengan corak desain flora dan fauna atau kombinasi garis-garis geometri serta posisi warna yang cukup mencolok, menjadikan tenun gedogan mempunyai ciri khas tersendiri. Kain tenun yang dihasilkan oleh pengrajin di daerah Sukarara ini terkenal mutunya sangat baik karena menggunakan bahan plus alat tenun yang merupakan hasil dari inovasi yang dilakukan oleh Muhammad Maliki (40 tahun). Alat tenun yang dimodifikasi oleh Maliki dapat membantu memudahkan pengerajin bekerja. Alat tenun yang dimaksud tersebut biasanya disebut dengan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Untuk pewarnaannya, kain tenun gedogan menggunakan pewarna dari kulit kayu sehingga menghasilkan warna-warna yang natural. Benang untuk pembuatan kain masih dipintal dengan tangan.

Kondisi Umum UKM di Kabupaten Lombok Tengah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Lombok Tengah tersebar secara merata di 12 Kecamatan. Pada umumnya pelaku UKM adalah pekerjaan *temporary job*, karena sebagian besar pelaku atau pemilik UKM masuk kedalam sektor ini terkadang merupakan respon dari ketidakmampuan mereka untuk masuk kedalam usaha-usaha besar akibat kejauhan dari pasar. Sektor informal dianggap sebagai batu loncatan sembari menunggu kesempatan untuk bekerja di sektor formal. Pada umumnya juga UKM merupakan usaha keluarga yang dikelola dengan prinsip kekeluargaan. Sehingga kelemahan yang tampak

dalam suatu UKM adalah dalam pengorganisasian, administrasi, pembukuan, keuangan, dan pemasaran. Pengorganisasian mencakup tidak jelasnya struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang yang tidak jelas, status karyawan, system penggajian dan kepegawaian yang tidak beres.

Sebagian besar UKM yang ada tidak memakai prinsip manajemen dalam pengelolaan usahanya. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan mereka tentang manajemen. Karena rata-rata pelaku UKM tingkat pendidikannya rendah. Disamping itu UKM yang ada sebagian besar merupakan usaha keluarga yang dikelola berdasarkan prinsip kekeluargaan dengan memakai prinsip mengambil peluang usaha yang ada, terdapat permintaan pasar, kemudian memproduksi barang, bisa balik modal dan mendapat keuntungan. Sehingga mereka merasa tidak perlu memakaiprinsip manajemen yang rumit dalam pengelolaan usaha mereka. Biasanya mereka cukup memakai pembukuan sederhana yang hanya mencantumkan pemasukan dan pengeluaran, itupun hanya beberapa UKM yang menggunakannya.

Dari sisi tenaga kerja, pada umumnya pekerja di sektor informal ini adalah pemilik dari UKM tersebut. Sedangkan pekerja atau pegawai sebagian besar merupakan anggota keluarga atau tetangga. Dengan sistem dari mulut ke mulut asalkan sesuai dengan gaji yang diberikan oleh pemilik UKM. Dari data yang ada, sebuah UKM mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 5 orang, sedangkan untuk UKM yang sedang berkembang mampu mempekerjakan lebih dari 20 orang pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa UKM mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Lombok Tengah.

Upaya Pemberdayaan UKM Sebagai Upaya Perluasan Kesempatan Kerja Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Upaya pemberdayaan sektor UKM dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan martabat UKM, sehingga UKM lebih mampu berperan dalam pencatutan ekonomi nasional. Seringkali upaya pemberdayaan terperangkap dalam bias-bias pemberdayaan. Hal ini perludilakukan agar para pakar dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini menjadi dasar terhadap hakikat pembangunan. Menurut Kartasasmita (1996) pemberdayaan UKM merupakan alternatif pemecahan terhadap berbagai dilema yang dihadapi sektor UKM. Adapun berbagai bias yang mungkin terjadi dalam pemberdayaan

yaitu :

Bias pertama, bahwa pemberdayaan UKM lebih mementingkan bantuan material (modal) daripada ketrampilan teknis atau manajerial. Pola dan anggapan semacam ini sering mengakibatkan upaya pemberdayaan itu sebagai pemborosan sumberdaya dan dana, karena kurang memperhatikan aspek teknis dan manajerial.

Bias kedua, anggapan bahwa program pemberdayaan UKM adalah program dari atas (pemerintah), dan mereka yang diberdayakan kurang menjadi titik sentral pelaksanaan. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan sektor UKM dalam proses pemberdayaan sangat diperlukan, dengan demikian program pemberdayaan tidak bertepuk sebelah tangan. Dalam kaitan dengan bias yang kedua sering kali proyek pemberdayaan UKM habis, maka habislah program pemberdayaan.

Bias ketiga, sektor UKM dianggap tidak tahu apa yang diperlukan atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan dibimbing dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Akibat dari anggapan semacam itu menjadikan proyek-proyek pemberdayaan UKM menjadi salah alamat. Dan mereka yang diberdayakan menjadi tetap tidak berdaya. Dalam jangka panjang program pemberdayaan UKM harus mampu mentransfer model pengusaha piramida menjadi model pengusaha belah ketupat. Dari model ini semula profil pengusaha kita mayoritas adalah usaha kecil (lapisan bawah), yang jumlahnya sangat besar. Sedangkan sebagian kecil adalah pengusaha besar yang menguasai sebagian modal usaha. Kondisi yang demikian akan sangat mengganggu pembangunan ekonomi bangsa dimasa yang akan datang.

Dimasa yang akan datang profil pengusaha Indonesia harus diubah menjadi belah ketupat, dimana mayoritas pengusaha adalah lapisan menengah. Kondisi semacam ini akan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan antara kaya dan miskin. Adapun determinan pengubah menyangkut persoalan penyempurnaan dalam sistem (pola) industrialisasi, pendidikan, pengembangan masyarakat dan juga pengembangan korporasi. Semuanya itu akan dapat dijalankan apabila dilandasi oleh semangat idealisme yang mencerminkan kebersamaan kita sebagai bangsa. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya untuk kemakmuran seluruh bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Apabila profil model pengusaha belah ketupat dapat dicapai, itu maknanya sektor UKM akan benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Amanat konstitusi (UUD 1945) akan terealisasi dalam

kenyataan dan semuanya itu akan dapat mendukung proses keutuhan negara dan sekaligus menjamin terjadinya stabilitas ekonomi nasional.

Pengembangan masyarakat di sini mengandung makna sikap masyarakat kewirausahaan. Jiwa dan semangat wirausaha harus ditanamkan dalam masyarakat. Ini semua dimaksudkan untuk membangun masyarakat sektor UKM. Dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bekerja sama dengan instansi terkait dan dengan pihak non-Government yang mempunyai perhatian khusus bagi perkembangan dunia usaha kecil di Kabupaten Lombok Tengah. Model pemberdayaan yang dipakai dalam usaha pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lombok Tengah adalah Pemberdayaan Partisipatoris yaitu pemerintah bersama masyarakat dalam hal ini pihak di luar pemerintah mengupayakan pemberdayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah. Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator, mediator, dan pengayom. Sebagai fasilitator pemerintah berperan memberi bantuan sarana dan prasarana pendukung bagi pihak pelaku UKM dan juga bagi pihak pemberi kredit yang bersedia untuk membantu UKM. Seperti menyediakan tempat pelatihan dan pengembangan, mendata UKM yang ada di Kabupaten Lombok Tengah untuk mencari tahu kondisi dan perkembangannya, serta mencari pokok permasalahan yang dihadapi UKM tersebut untuk kemudian dicari solusi yang tepat oleh pemerintah yang bekerjasama dengan pihak di luar pemerintah, dan lain-lain. Sebagai mediator, peran pemerintah adalah mempertemukan pelaku UKM yang akan dibina oleh pihak non-government yang akan membantu membina UKM. Disini pemerintah berperan mensosialisasikan program-program yang ditawarkan oleh pihak non-government tersebut kepada pelaku UKM. Pemerintah juga membantu pelaku UKM dalam mendapatkan bantuan modal dan ikut mempromosikan UKM mana yang layak untuk mendapatkan bantuan modal. Dan sebagai pengayom, pemerintah berperan melindungi UKM dengan membuat peraturan hukum yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban UKM. Seperti UU Antimonopoli yang bertujuan untuk melindungi UKM dari intervensi yang sifatnya langsung dan tidak berdasarkan pasar seperti program “bapak angkat”, kemitraan yang dipaksakan atau kredit subsidi.

Kendala terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah adalah masalah anggaran. Ketersediaan dana yang terbatas karena mengandalkan dana dari APBD, membuat pemerintah harus lebih bijak dalam mengelola

anggaran yang ada. Kegiatan-kegiatan pelatihan dan pembinaan harus disesuaikan juga dengan kemampuan finansial pemerintah. Karena itu kegiatan pelatihan dan pembinaan dilakukan terhadap aspek prioritas yaitu terhadap aspek produksi dan pemasaran. Sedangkan untuk aspek kelembagaan dan aspek sumber daya manusia yang sebenarnya menjadi kunci perkembangan UKM justru hanya menjadi materi sisipan di sela-sela pemberian materi tentang aspek produksi dan aspek pemasaran. Karena kelemahan yang menonjol dari sebagian besar UKM yang ada di Kabupaten Lombok Tengah adalah pada kondisi struktural organisasi dan tidak adanya perkembangan dari sumber daya manusia pelaku UKM. Tentu saja dua hal ini tidak dapat disepelekan tumpang tindihnya struktural organisasi dan rendahnya tingkat pendidikan pelaku UKM, akan menjadi masalah krusial untuk saat ini karena iklim persaingan usaha yang semakin ketat menuntut para pelaku UKM untuk terus berinovasi terhadap produk mereka dan kemampuan manajerial untuk berefisiensi terhadap asset perusahaan agar usaha mereka bisa terus berkembang.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemberdayaan dalam meningkatkan kapasitas UKM di era reformasi cukup mempunyai posisi yang strategis. Selain sebagai sektor yang paling tahan dilanda krisis juga mampu menyediakan kesempatan kerja dan mengurangi masalah pengangguran yang cukup besar diluar sektor formal. Keberadaan sektor ini yang tidak terikat pada rumitnya sistem birokrasi memungkinkan bagi siapa saja untuk berusaha disektor ini. Terlebih bila ditunjang dengan berbagai keahlian dan ketrampilan khusus, sarana dan prasarana yang canggih maka sektor UKM akan sangat menjajikan keuntungan yang besar.
2. Selanjutnya dari data yang ada, bahwa perkembangan sektor UKM dari tahun ke tahun di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren adanya kenaikan baik dari jenis usaha yang ditekuni maupun kualitas usahanya. Dengan kondisi ini bila dikembangkan diseluruh lapisan masyarakat kita, maka tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak bekerja, kecuali bagi mereka yang sejak awal memang dasarnya pemalas. Paradigma yang kurang bagus ini tampaknya harus dihapus dan tidak sesuai lagi dengan kehidupan modern dengan prinsip *time is money*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Subianto, *Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat*, (Jakarta : Yayasan bermula dari kanan, 2004)., hlm. 40
- Augusty, Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment): Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Danoko, Florence. 2008. *Strategi Pengembangan Usaha Kecil*. Universitas Kristen Krida Wacana. Jakarta
- Evanovalita (2007) *Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Sebagai Upaya Perluasan Kesempatan Kerja (Studi Pada Pemerintah Lombok Tengah)*.
- Faisal, Sanapiah. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Herawati, Nety. *Lilitan Masalah Usaha Mikro kecil, Menengah (UMKM) dan Kontroversi Kebijakan*. Medan: Bitra Indonesia, 2003
- Kartasmita, Ginandjar. 2013. *Strategi Pengembangan Usaha Kecil: “Kesempatan dan Tantangan dalam Proses Transformasi Global dan Nasional”*. Seminar Nasional, HUT HIPPI. Jakarta Kiyomet Tunca Çaliyurt. 2011. *Importance Of Financial Management Knowledge In Small And Medium Enterprises (Smes) Managing By Women*.
- Moleong. Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Karya.
- Nawawi, Hadari. 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Universitas Gajah Mada. Pers. Yogyakarta
- Prasetyo (2008) *Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*.
- Sopannah. 2010. *Peran dan Permasalahan Usaha Mikro*. <http://siap-bos.blogspot.com/2009/05/peran-dan-permasalahan-usaha-mikro.html>. Diunduh Tanggal 22 Oktober 2017.
- Sulaeman, Suhendar. (2010). *Analisis Manfaat Lembaga Keuangan Berbentuk Koperasi (KSP/USP)*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. No. 2 Jilid 9.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar

- Syarifudin, dkk (2016) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Ternate (Studi Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate).
- Tambunan, Tulus .2000. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
- Tambunan, Tulus. 2003. Perkembangan UMKM dalam Era AFTA: Peluang, Tantangan, Permasalahan dan Alternatif Solusinya. Paper Diskusi pada Yayasan Indonesia Forum.
- Tambunan, Tulus. 2012, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: *Isu-Isu Penting*. LP3ES
- Todaro, Michael P. 1999. *Economics Development in the Third World*, The Longman Inc New York.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.
- Wahyudin, Dian. 2013. Peluang atau Tantangan Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015. Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.